



**UNIVERSITAS
KRISTEN
INDONESIA**

BUKU PEDOMAN TUGAS-TUGAS PERKULIAHAN

**PROGRAM STUDI
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 2021**



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA - INDONESIA**

PEDOMAN TUGAS-TUGAS PERKULIAHAN
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional 2021

Penyusun

Mita Yesyca, M.Sc

V.L. Sinta Herindrasti, MA

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta - Indonesia

PEDOMAN TUGAS-TUGAS PERKULIAHAN
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional 2021

Penyusun

Mita Yesyca, M.Sc

V.L Sinta Herindrasti, MA

Editor/ Tata Letak

Jovi Honnest Fedron

ISBN :

978-623-6963-44-9

Penerbit : UKI Press

Redaksi : Jl. Mayjen Sutoyo No 2 Cawang Jakarta 13630

Telp : 021- 8092425

Cetakan I, Jakarta: UKI Press 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Pembelajaran berbasis peserta didik atau *Student Centered Learning (SCL)* -- suatu pendekatan dengan melibatkan mahasiswa secara aktif, yang dipercaya meningkatkan kualitas belajar peserta didik -- pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (IHI) Universitas Kristen Indonesia telah berjalan seiring dengan pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sejak Tahun Ajaran 2015/2016.

Dengan demikian semakin banyak diperlukan berbagai materi pendukung untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri (*self-study*) bagi para peserta didik baik dalam bentuk buku pedoman, materi pembelajaran, maupun modul-modul pembelajaran.

Mahasiswa tahun pertama pada Program Studi IHI membutuhkan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas perkuliahan dalam bentuk format Ringkasan, Ulasan, Esai, Makalah serta nantinya penulisan Tugas Akhir (Skripsi).

Untuk tujuan itulah Buku Pedoman Tugas-Tugas Perkuliahan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional ini diterbitkan setelah mengalami perbaikan dari draft 2018 agar dapat membantu dan mendukung kelancaran mahasiswa/i dalam proses pembelajaran pada program studi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tim dosen penyusun dan berbagai saran yang diberikan para dosen. Semoga buku pedoman ini bermanfaat.

Jakarta, 24 Juli 2021

Dra. V.L. Sinta Herindrasti, MA
Ketua Program Studi
NIP/NIDN 101748/0312026202

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

Bab I Pedoman Tugas-Tugas Perkuliahan

A. Sistem Author-Date Chicago	1
-------------------------------------	---

Bab II Jenis-Jenis Tugas Tertulis

A. Ringkasan/ <i>Summary</i>	4
B. Ulasan/ <i>Review</i>	6
C. Esai/ <i>Essay</i>	12
D. Makalah/ <i>Paper</i>	18

LAMPIRAN

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 2016

Kamus Bahasa Indonesia 2008

BAB I

PEDOMAN TUGAS-TUGAS PERKULIAHAN

Hampir di semua mata kuliah mahasiswa/i diberikan tugas menulis. Tugas-tugas ini termasuk ujian tertulis yang dikerjakan di kelas dalam waktu satu atau dua jam, maupun tugas akhir berupa skripsi yang memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menyusunnya. Pedoman ini ditujukan agar mahasiswa/i serta dosen-dosen pengajar mempunyai gambaran yang seragam mengenai tampilan ataupun struktur dalam tugas-tugas tertulis. Melalui pedoman ini, diharapkan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh mahasiswa/i Ilmu Hubungan Internasional UKI selama kuliah dapat memenuhi standar teknis tulisan dalam jurnal-jurnal ilmiah nasional tanpa membatasi kreativitas gagasan setiap mahasiswa/i.

Tugas tertulis diberikan kepada mahasiswa/i dengan beberapa tujuan, misalnya untuk (1) melaporkan sebuah riset yang telah dilakukan, (2) menjawab pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa/i, (3) membahas atau mendiskusikan sebuah topik yang menarik minat orang kebanyakan serta memberikan pandangan pribadi mahasiswa/i atas topik tersebut, dan (4) menarik kesimpulan atas riset-riset mengenai topik tertentu yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para ilmuwan sosial (Bailey 2015, 3). Oleh karenanya, tugas menulis tidak dapat dikerjakan dengan sembarangan. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/i dalam menyusun sebuah karya tulis, yakni mengenai teknis penulisan, mengikuti standar yang dipakai oleh komunitas akademik tertentu.

Beberapa format lain yang sering dipakai oleh komunitas akademik pada umumnya adalah *Modern Language Association (MLA)*, *American Psychological Association (APA)* dan Chicago. Masing-masing format memiliki kedekatan dengan bidang keilmuan tertentu. Format **Chicago** dipilih sebagai acuan format penulisan untuk setiap tugas kuliah tertulis di program studi IHI. Chicago sendiri memiliki dua sistem, yakni sistem *Notes-Bibliography (NB)* dan sistem *Author-Date (AD)*. Sistem AD lebih banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, sehingga dalam pedoman ini pun sistem AD Chicago yang akan dijelaskan lebih lanjut.

A. Sistem Author-Date Chicago

Sistem AD menggunakan metode sitasi atau kutipan yang disisipkan ke dalam paragraf, atau yang sering dikenal sebagai *bodynotes*, untuk **mengidentifikasi suatu sumber saat sebuah informasi disebutkan di dalam teks**. Penyebutan sumber informasi merupakan hal yang krusial dalam karya tulis ilmiah. Caranya, dengan **menuliskan nama akhir penulis dan tanggal publikasi** setelah sebuah informasi dimasukkan ke dalam teks. Hal penting lain yang perlu diperhatikan mengenai format Chicago ini adalah bahwa **setiap sumber yang muncul dalam teks harus mempunyai keterangan rujukan terkait dalam Daftar Referensi di akhir tulisan**. Maksudnya, sitasi singkat dalam teks (*in-text citations*) diperjelas di dalam sebuah daftar referensi, yang menampilkan informasi kepastakaan secara lengkap kepada pembaca. Contoh penulisan sitasi dan Daftar Referensi adalah sebagai berikut.

Author-Date	Sitasi dalam Teks	Daftar Referensi
Sebuah buku	(Pollan 2006, 99–100)	Pollan, Michael. 2006. <i>The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals</i> . New York: Penguin.
Dua atau tiga penulis	(Ward dan Burns 2007, 52)	Ward, Geoffrey C., dan Ken Burns. 2007. <i>The War: An Intimate History, 1941–1945</i> . New York: Knopf.
Empat atau lebih penulis	Sebutkan nama penulis pertama, diikuti <i>et al.</i> (“dan lainnya”): (Barnes et al. 2010)	Sebutkan semua nama penulis di Daftar Referensi dengan hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis lebih dulu atau dibalik; nama penulis lainnya ditulis seperti biasa.
Editor atau penerjemah, bukan penulis asli	(Lattimore 1951, 91–92)	Lattimore, Richmond, penerj. 1951. <i>The Iliad of Homer</i> . Chicago: University of Chicago Press.
Editor atau penerjemah, di samping penulis asli	(García Márquez 1988, 242–55)	García Márquez, Gabriel. 1988. <i>Love in the Time of Cholera</i> . Diterjemahkan oleh Edith Grossman. London: Cape.
Satu bab dalam sebuah buku	(Kelly 2010, 77)	Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” Dalam <i>Anthropology and Global Counterinsurgency</i> , diedit oleh John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, dan Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press.
Pendahuluan, Pengantar, Introduksi, atau bagian lain dalam sebuah buku	(Rieger 1982, xx–xxi)	Rieger, James. 1982. Introduksi untuk <i>Frankenstein; or, The Modern Prometheus</i> , oleh Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press.
Sebuah artikel dalam jurnal cetak	(Weinstein 2009, 440)	Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s <i>Republic</i> .” <i>Classical Philology</i> 104:439–58.
Sebuah artikel dalam jurnal elektronik	(Kossinets and Watts 2009, 411)	Kossinets, Gueorgi, dan Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” <i>American Journal of Sociology</i> 115:405–50. Diakses pada 28 Februari 2010. doi:10.1086/599247.
Sebuah artikel di koran atau majalah	(Mendelsohn 2010, 68)	Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” <i>New Yorker</i> , 25 Januari.
	(Stolberg dan Pear 2010)	Stolberg, Sheryl Gay, dan Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” <i>New York Times</i> , 27 Februari. Diakses pada 28

		Februari 2010. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html .
Ulasan sebuah buku	(Kamp 2006)	Kamp, David. 2006. "Deconstructing Dinner." Ulasan tentang <i>The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals</i> , oleh Michael Pollan. <i>New York Times</i> , 23 April, Sunday Book Review. http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html .
Skripsi, tesis, atau disertasi	(Choi 2008)	Choi, Mihwa. 2008. "Contesting <i>Imaginaires</i> in Death Rituals during the Northern Song Dynasty." Disertasi PhD, University of Chicago.
Sebuah website	(Google 2009) (McDonald's 2008)	Google. 2009. "Google Privacy Policy." Diubah terakhir pada 11 Maret. http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html . McDonald's Corporation. 2008. "McDonald's Happy Meal Toy Safety Facts." Diakses pada 19 Juli. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html .

(diolah dari: Chicago Manual of Style Online 2017)

Hal penting lainnya:

- ✓ Jangan lupa juga untuk memastikan informasi kepastakaan di dalam **Daftar Referensi** tertulis secara **alfabetikal** atau urut abjad.
- ✓ **Catatan kaki atau catatan akhir** dipakai untuk **menjelaskan teks di dalam teks**. Dengan kata lain, jika terdapat istilah-istilah atau konteks penting yang perlu diketahui pembaca agar dapat memahami keseluruhan alur teks, maka penjelasan mengenai istilah ataupun konteks tersebut **harus disampaikan melalui catatan kaki dengan tetap mencantumkan sumbernya di akhir catatan** (menuliskan *bodynotes* pada *footnotes* yang bersumber dari tulisan orang lain).

Daftar Referensi

Bailey, Stephen. 2015. *Academic Writing: A Handbook for International Students*. 4th Edition. New York: Routledge.

The Chicago Manual of Style *Online*. 2017. "Citation Quick Guide". Author Date: Sample Citations. https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html

BAB II

JENIS-JENIS TUGAS TERTULIS

Beberapa tugas tertulis bagi mahasiswa/i yang umum dikerjakan selama kuliah beserta penjelasannya. **Catatan penting:** Menulis ilmiah mengharuskan setiap mahasiswa/i akrab dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia online (<https://kbbi.web.id> dan <https://puebi.readthedocs.io/en/latest/>) agar **memahami penulisan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang benar dan baku.**

1. Summary/Ringkasan

Adalah uraian ringkas, ditulis sebanyak 1-2 halaman A4, mengenai *isi* dari sesuatu, misalnya sebuah film, buku, bab tertentu dalam sebuah buku, paparan seminar, artikel jurnal, artikel koran, dan lain-lain. Dalam menulis ringkasan, tulisan disusun rata kanan-kiri dengan awal paragraf yang menjorok ke dalam. Font yang digunakan adalah Times New Roman, ukuran 12, dan spasi 1,5. **Beri nomor halaman pada bagian bawah.** Contoh ringkasan:

Tugas I MK THI 2015 - Ringkasan

Nama : Andi Natanael

NIM : 1456789012

Sumber : Lowery, Alan. 2001. "The New Rulers of the World."

UK: Carlton International Media Ltd.



The New Rulers of the World merupakan film tahun 2001 yang membahas bagaimana globalisasi dialami secara nyata oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang menjadi *setting* film ini. Film dokumenter yang diproduksi oleh John Pilger tersebut membuka pemahaman/gambaran mengenai kondisi globalisasi dari kacamata ekonomi di mana negara-negara kapitalis yang menguasai teknologi tetapi miskin sumber daya alam telah menjadikan negara dunia ketiga, negara yang memiliki sumber daya alam tetapi tidak memiliki modal dan teknologi, sebagai tempat mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi (perusahaan-perusahaan) mereka sendiri. Tanpa melihat, apalagi memperhatikan, dampak atas perilaku ekonomi mereka tersebut di negara-negara dunia ketiga. Negara kapitalis melalui lembaga-lembaga ekonomi internasional yang dimotorinya berupaya melakukan pengintegrasian dari perekonomian nasional negara-negara di dunia yang timpang ini ke dalam sebuah sistem ekonomi global. Sehingga berikutnya terjadilah apa yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi dalam film ini: aliran modal, teknologi, tenaga kerja hingga komoditas yang bebas bergerak melampaui batas negara.

Dalam film ini, John Pilger memberikan contoh riil globalisasi ekonomi yang terjadi di Indonesia. Bagi para pendukungnya, globalisasi ekonomi diyakini akan menciptakan kesejahteraan yang merata dan mengurangi pengangguran. Tetapi apa yang terjadi di banyak negara, seperti di Indonesia, tidaklah demikian kenyataannya. Globalisasi mendorong pemiskinan dan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia. Film ini memperlihatkan bagaimana kondisi buruh yang bekerja di pabrik-pabrik perusahaan multinasional seperti Nike dan GAP dengan upah yang rendah, jam kerja yang tidak teratur, dan kondisi tempat kerja yang mengénaskan, sementara para buruh ini dipaksa untuk terus bekerja dan seakan tidak punya pilihan lain selain terus melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan mereka di pabrik *outsourcing* itu. John Pilger juga memperlihatkan bagaimana kondisi tempat tinggal para buruh yang bisa dikatakan kumuh, dan bagaimana mereka menyiasati upah mereka agar mencukupi kebutuhan keluarganya dengan cara mengurangi porsi makan dan tingkat gizinya. Para pekerja yang mengalami eksploitasi tersebut tidak dapat menyuarakan aspirasi mereka karena diancam akan tidak dipekerjakan lagi bila melakukan tindakan protes dan semacamnya.

Di bagian lain dalam film ini, Pilger mengungkapkan bagaimana organisasi seperti World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank memanfaatkan posisi mereka untuk mengintervensi kebijakan negara-negara klien mereka (negara-negara berkembang) demi kepentingan ekonomi negara-negara kapitalis dalam organisasi-organisasi tersebut. Di Indonesia, organisasi-organisasi tersebut berhasil masuk melalui rezim Soeharto. Mereka memberikan pinjaman dengan dalih tujuan pembangunan Indonesia, yang pada titik tertentu justru menjadi ‘pembangunan’ fondasi kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya sementara rakyat Indonesia yang sama sekali tidak pernah mendapat manfaat dari pinjaman tersebut harus menanggung beban hutang negara. John Pilger juga mewawancarai Stanley Fischer, wakil direktur IMF, dan Nicholas Stern, seorang pejabat Bank Dunia di masa itu, dan semakin mendapati kenyataan bahwa para penguasa baru dunia (*the new rulers of the world*) adalah lembaga-lembaga multilateral seperti IMF dan World Bank yang mampu ‘mengatur’ perekonomian hampir semua negara-negara di dunia agar sejalan dengan nilai-nilai yang mereka sebarkan: neoliberalisme. Film ini lantas ditutup dengan liputan aksi dari gerakan antiglobalisasi di Seattle untuk menghambat pertemuan WTO, dan aksi *mayday* di London. Gelombang massa penentang globalisasi memang sedikit diberitakan oleh media, tetapi mereka sebenarnya terjadi di banyak negara.

2. Ulasan/Review

Adalah tulisan yang *mendiskusikan isi* dari sesuatu, misalnya sebuah film, buku, bab tertentu dalam sebuah buku, paparan seminar, artikel jurnal, artikel koran, dan lain-lain. Dalam menulis ulasan, bagian awal tulisan akan selalu berisi ringkasan dari hal yang diulas, misal ringkasan isi buku, seminar, film, artikel, dan lain-lain, yang diikuti dengan diskusi menggunakan bahan perbandingan dan ulasan disusun rata kanan-kiri dengan awal paragraf yang menjorok ke dalam. Font yang digunakan adalah Times New Roman, ukuran 12, dan spasi 1,5. Pastikan halaman diberi nomor agar tidak melebihi batas jumlah halaman yang diberikan dosen dan selalu sebutkan sumber yang diulas di bagian awal tulisan. Contoh ulasan:

Tugas II MK THI 2015 - Ulasan

Nama : Andi Natanael

NIM : 1456789012

Sumber : Lau, Olivia. 2003. "United Nations Security Council Expansion: The Efficacy of Small States under Bipolarity and Uni-Multipolarity." Diakses secara *online*, <https://www.olivialau.org/papers/unreform.pdf>.



Apakah Barometer Kesuksesan Restrukturisasi DK PBB?

(Studi Kasus Kegagalan Rencana Razali Tahun 1997)

Penulis memilih kalimat Kofi Annan bahwa '*reform is a process, not an event*'¹ sebagai kalimat yang mewakili ide inti dari ulasan mengenai pembaharuan struktur keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) ini. Di bagian awal, penulis terlebih dulu meringkas tulisan Olivia Lau yang menjadi sumber utama. Selanjutnya penulis mencoba menganalisis kegagalan Rencana Razali dari level makro, mikro, dan meso untuk kemudian mengevaluasi keberhasilan restrukturisasi DK PBB secara kualitatif. Menurut penulis, keberhasilan secara kuantitatif yang memperlihatkan bukti nyata revisi Piagam PBB seperti yang terjadi pada 1963 menemui banyak kendala di tengah sistem uni-multipolar sekarang ini. Namun penulis tetap memandang positif apa yang dikatakan oleh Lau, bahwa mempelajari situasi di mana usaha restrukturisasi DK tahun 1997 menemui kegagalan berguna untuk mengusahakan keberhasilan restrukturisasi pada masa yang akan datang; terlepas dari adanya perdebatan apakah mengidentifikasi lalu menyetujui restrukturisasi akan melemahkan atau

¹Kalimat Kofi Annan ini dikutip oleh Edward C. Luck (2005) saat membahas dinamika reformasi PBB. Tentunya peran Kofi Annan sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada 1997-2006, masa di mana isu pembaruan terhadap DK PBB terus mengisi agenda global, telah meyakinkan beliau bahwa realisasi ide restrukturisasi itu memerlukan jangka waktu yang cukup lama dan harus ditinjau secara berkala (per dekade).

justru menguatkan kapasitas dewan dalam menghasilkan keputusan yang efektif (Roberts dan Kingsbury 1994).

Dengan preseden keberhasilan pembaruan DK pada 1963, Lau menekankan signifikansi mayoritas suara negara-negara berkembang dalam Majelis Umum (MU) PBB bagi restrukturisasi DK PBB untuk kedua kalinya. Gagasan restrukturisasi ini kembali mengemuka setelah berakhirnya Perang Dingin; restrukturisasi diperlukan untuk efektivitas kinerja DK sebagai salah satu organ utama PBB, yang bertanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam tulisannya, Lau menyebutkan beberapa alasan untuk restrukturisasi ini, yaitu: kegagalan DK PBB melucuti persenjataan militer Irak maupun mencegah tindakan unilateral Amerika Serikat karenanya; ‘*taxation without representation*’ yang terjadi pada Jepang dan Jerman sebagai penyumbang terbesar kedua dan ketiga pada anggaran belanja PBB; serta meningkatnya jumlah personil dan dana untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB yang mendorong Amerika Serikat (AS), penyumbang dana terbesar untuk operasi ini, mengatur metode operasi dan juga pembagian sumbangan di antara negara-negara lain secara lebih efisien.

Pembaruan terhadap struktur komposisi keanggotaan DK PBB berarti mengamandemen Piagam PBB. Sesuai dengan pasal 108 piagam, revisi atas Piagam PBB itu sendiri membutuhkan: pertama, dua pertiga dukungan dari anggota MU; kedua, ratifikasi oleh dua pertiga dari seluruh anggota PBB, termasuk lima anggota tetap, dalam jangka waktu yang disepakati. Pada dasarnya, hal yang menjadi penentu keberhasilan revisi Piagam PBB adalah keputusan lima anggota tetap. Veto terhadap amandemen pada tahap ratifikasi memang tidak dapat dicegah, tetapi di sisi lain kelima anggota tetap pun tidak dapat mengatur hasil akhir proses restrukturisasi ini melalui cara lain.

Lolosnya rancangan restrukturisasi DK pada 1963 di tahap ratifikasi dapat dipahami sebagai bagian dari pengambilan keputusan strategis kelima anggota tetap DK (saat itu Tiongkok Nasionalis masih di dalamnya) di masa Perang Dingin, terutama karena isu pengakuan atas *People’s Republic of China* dan dekolonisasi oleh Bangsa Eropa. Juga, pola suara negara-negara non-blok pun ikut memengaruhi usaha restrukturisasi DK di tahun yang sama. Perang Dingin seolah menjadi katalisator bagi koalisi suara negara-negara non-blok dalam MU. Di tahun 1963, jumlah mereka dalam MU mencapai 112 atau 72% dari MU. Kekuatan dalam jumlah ini menjadi pendukung utama untuk memengaruhi DK mengambil keputusan.

Namun, uni-multipolar yang terjadi pasca-Perang Dingin membuat negara-negara non-blok kehilangan kebulatan suaranya. Melalui Rencana Razali, Afrika menginginkan

keterwakilan mereka melalui dua kursi anggota tetap DK lengkap dengan hak vetonya. Nantinya, kedua kursi itu akan diduduki secara bergiliran. Menurut Lau, kendala juga muncul karena negara *middle power* dari masing-masing region menunda resolusi di tahun 1997 akibat ketidaksepehaman akan siapa kandidat anggota tetap DK yang dipilih berdasarkan pertimbangan geografi. Italia dan Turki keberatan atas usulan memilih Jerman menjadi kandidat dari Eropa. Negara-negara non-blok menginginkan keterwakilan negara berkembang juga. Pakistan tidak setuju jika India menjadi kandidat dari Asia. Sementara Meksiko dan Kanada tidak menyetujui penambahan anggota tetap tetapi mendukung pembatasan penggunaan hak veto. Akhirnya, Rencana Razali berakhir karena tidak mendapatkan dukungan suara dua pertiga dari MU.

Di akhir tulisannya, Lau menyimpulkan bahwa perpecahan suara di antara negara-negara non-blok setelah berakhirnya Perang Dingin mengakibatkan tidak adanya keputusan mengenai restrukturisasi DK PBB, baik bentuk restrukturisasi yang diinginkan oleh kelima anggota tetap maupun oleh negara-negara mayor pada region masing-masing yang ingin menjadi anggota tetap. Menurut Lau, pada masa berikutnya negara-negara kecil harus menyatakan kekuatan mereka dalam hal jumlah dan bersama-sama mendukung suatu rancangan restrukturisasi DK seperti pada tahun 1963.

Analisis Kegagalan Rencana Razali dari Tiga Level

Penulis melihat bahwa Piagam PBB memberikan hak dan kewajiban bagi negara-negara anggotanya, sehingga ia dapat disebut sebagai suatu hukum (internasional). Untuk memahami kegagalan Rencana Razali, penulis menggunakan ulasan Wayne Sandholtz dan Alec Stone Sweet (2004, 239) yang menjelaskan bagaimana politik hukum internasional (*the politics of international law*) tak dapat dipisahkan dari isu *governance* di ranah internasional. *Governance* merupakan proses di mana *rule system* dikonstruksi dan diaplikasikan terhadap kebutuhan dan tujuan dari mereka yang ada di dalamnya. Menurut penulis, proses untuk merevisi Piagam PBB yang bertujuan merestrukturisasi DK PBB dapat digolongkan sebagai *governance*. Dinamika di dalamnya dapat ditelaah dari level makro, sistem institusional di mana semua aktivitas sosial dilakukan; level mikro, bagaimana aktor individual memengaruhi proses pengambilan keputusan; dan level meso, bagaimana akhirnya struktur dalam sistem internasional diciptakan dan digunakan untuk mengkoordinasikan tujuan tertentu aktor-aktor di dalamnya.

Di tingkat mikro, dengan mengasumsikan bahwa setiap aktor bertindak rasional dalam memaksimalkan kepentingan mereka, maka mereka akan menggunakan strategi untuk

mengatasi keterbatasan daya, informasi yang tidak sempurna, hingga mengatasi adanya institusi. Melalui *game theory*, dapat dipahami bahwa institusi berperan dalam menghasilkan *political outcomes* (perubahan pada aturan main akan selalu mengubah cara bermain dan mengakibatkan hasil akhirnya pun berbeda). Sandholtz dan Stone Sweet menyatakan bahwa norma akan selalu berimplikasi politik; sebab, norma berkembang dalam suatu proses manusia berintuisi. Sesuatu yang terintegrasi dalam diri manusia sejak lahir sebagaimana ia mampu mempertimbangkan nilai dan kegunaan suatu hal bagi dirinya. Ini dapat dijelaskan secara psikologis. Dalam menghadapi sebuah masalah, manusia normal akan berlogika untuk mencari solusi dan pembenaran. Reus Smit (2004, 244) menyebutnya sebagai logika untuk memaksimalkan (kepentingan) dan logika alasan normatif. Demikian halnya yang terjadi pada proses restrukturisasi DK, setiap aktor secara rasional berusaha memasukkan kepentingannya dalam agenda restrukturisasi.

Pada level makro, institusi atau sebuah *rule system* merupakan suatu kondisi abstrak yang memungkinkan para aktor di dalamnya untuk merancang, mengejar, dan menunjukkan kepentingan dan keinginan mereka sekaligus mengkoordinasikan keinginan tersebut dengan aktor lain. Institusi merupakan suatu definisi yang *continuum*. Di satu sisi relatif informal—mekanisme maupun aktornya tidak akurat—di sisi lain dalam arti yang formal, spesifik, dan berotoritas, dalam artian mampu mengikat unit-unit di dalamnya. Sebuah institusi internasional dapat berada di antara keduanya, dan di sinilah muncul indikasi berjalannya keputusan politis melalui koridor hukum. Contoh *rule system* yang berada di antara kedua titik ekstrim spektrum *continuum* tadi adalah PBB. Walaupun Piagam PBB dapat dipandang sebagai hukum internasional dan peran PBB diakui sebagai lembaga yang berotoritas untuk membahas isu-isu multilateral, namun kemampuan mengikat keputusan yang dihasilkan oleh PBB sangat bergantung pada itikad baik negara-negara besar anggota PBB, khususnya kelima anggota tetap. Menurut Sandholtz dan Stone Sweet pula, setiap keputusan, ataupun tindakan yang dilakukan atas nama solusi normatif tidak akan lepas dari sifat politis dan pelaksanaan *power* karena institusi adalah sesuatu yang abstrak—*rule structure* tidak dapat bertindak sendiri tanpa diaplikasikan oleh aktor—dan juga karena nyatanya institusi justru dapat menjadi sumber dari perselisihan di antara para aktor. Sehingga setiap keputusan dalam MU hingga veto oleh anggota tetap DK, termasuk untuk merestrukturisasi DK, wajar bila bersifat politis.

Pada level meso, level ini menghubungkan level makro yang abstrak dan level mikro yang terdiri atas unit-unit. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, unit aktor dalam institusi dapat berganti pandangan terhadap suatu *rules* ketika mereka mendapati situasinya berubah kompleks; mengambil keputusan politis. Menurut Sandholtz dan Stone Sweet, seorang aktor

dapat mengingkari gagasannya di masa lampau demi memperoleh keuntungan pribadi di masa kini sebagaimana *the prisoner's dilemma*. Selanjutnya, konsep-konsep Joseph Frankel dalam *International Relations in a Changing World* mampu menguraikan dengan lebih jelas apa yang terjadi pada level meso ini.

Policies atau kebijakan suatu negara mengacu pada aktivitas–aktivitas yang lebih spesifik dari *objectives*, yakni langkah-langkah konkrit menuju gol yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Memahami bahwa restrukturisasi DK PBB pasti melibatkan kebijakan luar negeri masing-masing negara anggota PBB, maka penulis mendapati bahwa proses restrukturisasi DK PBB tak akan lepas dari gol yang ingin dicapai oleh mereka. Sifatnya pun menjadi dinamis karena gol—*preferred future situations*—yang ingin dicapai suatu negara, harus berhadapan dengan gol milik negara-negara lain dan sangat memungkinkan terjadi perselisihan karenanya.

Arnold Wolfers mengatakan bahwa gol dipengaruhi oleh *value* yang berkembang di negara itu, entah yang dominan terhadapnya adalah tingkat individu (*value* pemimpin negara), atau tingkat *state* (sesuai kebutuhan rakyat yang memberi mandat kepada negara), atau tingkat sistem; yang menurut Kenneth Waltz, sistem pun dapat memaksa para aktor di dalamnya beraksi dengan cara-cara tertentu (Jackson dan Sorensen 1999). *Value* memotivasi aktor individu untuk bertindak dan pada gilirannya memotivasi aktor *state* dalam mengambil suatu kebijakan. *Value* itu sendiri sulit untuk diubah. *Value* dapat lahir dan berkembang seiring perkembangan zaman. Salah satu contoh pengaruh perkembangan *value* terhadap kegagalan restrukturisasi DK di tahun 1997, yaitu ketika Perang Dingin berakhir, *value* untuk menjadi yang dominan berkembang dengan dipicu oleh runtuhnya dominasi Uni Soviet. Di Eropa *predominate value* menyebabkan perubahan ke sistem multipolar (Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan mungkin Italia) yang lebih tidak stabil dibandingkan bipolar. Di antara negara-negara *middle power* muncul keinginan untuk menjadi *major power* di regionnya. Sehingga, menjadi hal yang dilematis ketika suatu region harus memutuskan siapa kandidat anggota tetap DK PBB dalam Rencana Razali. Kekompleksan *predominate value* di antara anggota MU PBB berujung pada berakhirnya usaha Rencana Razali—dengan tidak adanya dua pertiga dukungan anggota MU dalam memutuskan kandidat-kandidat anggota tetap DK yang baru.

Mengukur Keberhasilan Proses Restrukturisasi: Tidak Ada Barometer Abadi

Dari uraian di atas, penulis melihat bahwa untuk mengukur pencapaian atau keberhasilan proses panjang restrukturisasi DK secara kualitatif tidak dapat terlepas dari apa yang terjadi di tiga level tadi: mikro, makro, dan meso. Pada level makro, kecil kemungkinan

suatu rancangan kebijakan dapat diterapkan bagi semua negara dengan mengingat heterogenitas negara-negara di dunia. Hal itu pun cukup sulit terealisasi karena kompleksitas kepentingan dalam sistem uni-multipolar sekarang ini; multipolar dengan munculnya *new emerging markets* tanpa memarjinalkan kenyataan akan hegemoni AS pasca-Perang Dingin.

Di level mikro, setiap orang memiliki kacamata masing-masing untuk melihat restrukturisasi DK PBB. Hal ini semakin menonjol di forum multilateral-internasional; di mana terdapat ratusan negara, banyak sekali aktor institusi internasional, dan dengan agenda yang tak akan pernah habis. Bahkan ketika suatu rancangan dapat diadopsi oleh seluruh negara, ia hanya dapat bertahan sementara waktu akibat perkembangan hubungan internasional kontemporer. Olivia Lau mencatat, setelah restrukturisasi DK PBB pada 1963, diskusi informal mengenai restrukturisasi muncul lagi di tahun 1979.

Dinamika hubungan internasional dan perkembangan globalisasi akan selalu mampu melahirkan isu-isu baru maupun mengembangkan *value* di tingkat mikro, mengubah *rule system* di tingkat makro, dan mengakibatkan interaksi di level meso tidak akan pernah statis. Sehingga, menurut penulis, tidak ada barometer abadi untuk mengukur keberhasilan restrukturisasi DK. Hasil restrukturisasi harus dikaji secara berkala terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat internasional sebagai upaya pengawasan sekaligus pendukung efektivitas kinerja DK dalam memelihara keamanan dan perdamaian internasional.

Kesimpulan

Penulis sependapat dengan Edward C. Luck yang memberikan tiga standar kesuksesan restrukturisasi: pertama, melalui proses restrukturisasi apakah terjadi perubahan cara berpikir para pembuat kebijakan, pemimpin opini, dan rakyat mengenai suatu isu, pilihan kebijakan yang berat, prioritas kepentingan dan *value*; kedua, apakah proses restrukturisasi mampu menempatkan konsep dan proposal mengenai hasil akhir perubahan dan/atau restrukturisasi di antara negara-negara anggota PBB meskipun mereka tidak memastikan untuk dapat mencapainya dalam jangka pendek; dan ketiga, apakah proses restrukturisasi dapat memperluas pemikiran para aktor dalam DK PBB sebelum mengambil keputusan, mendorong mereka untuk memikirkan isu dan institusi global lebih daripada kebijakan-kebijakan yang bersifat spesifik. Standar kesuksesan yang terakhir erat kaitannya dengan interdependensi antarnegara akibat terbentuknya *borderless environment* pada era globalisasi ini. Ketiga hal ini penting untuk mengukur keberhasilan restrukturisasi DK yang bertujuan meningkatkan efektivitas kinerja DK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Daftar Referensi

- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Luck, Edward C. 2005. "The UN Reform Commissions." Dalam *International Commissions and the Power of Ideas*. Tokyo: United Nations University Press.
- Roberts, Adam dan Benedict Kingsbury. 1994. *Presiding Over a Divided World: Changing UN Roles, 1945-1993*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Sandholtz, Wayne dan Alec Stone Sweet. 2004. *Law, politics, and international governance*. Dalam *The Politics of International Law*, diedit oleh Christian Reus Smit. Cambridge: Cambridge University Press.

3. Esai/Essay

Adalah suatu hasil riset mengenai satu topik yang spesifik/khusus. Tugas esai selalu melibatkan penelitian tentang sebuah topik: mengumpulkan berbagai informasi tentang sebuah isu kemudian menyimpulkannya berdasarkan informasi yang diperoleh dan disusun secara logis. Tentunya informasi yang digunakan adalah yang berasal dari sumber-sumber terpercaya. Kesimpulan esai dapat dikatakan sebagai sebuah kepercayaan (*belief*) mengenai suatu isu dengan mempertimbangkan berbagai hal terkait yang mendukung dan mempertahankan kepercayaan tersebut.

Menulis esai seringkali merupakan tugas yang bertahap, tidak dapat diselesaikan dalam satu waktu singkat. Esai yang baik selalu kaya akan informasi dan mengalir secara logis mulai dari pendahuluan, diskusi, dan berakhir pada sebuah kesimpulan yang meyakinkan. Karenanya, proses penulisan esai akan membutuhkan waktu dan informasi yang cukup untuk pembahasan dan pertimbangan. Untuk mempermudah penulisan esai, mahasiswa/i dapat memulainya dengan menyusun sebuah kerangka tulisan yang terdiri atas poin-poin inti paragraf yang runut sebelum mulai menulis dalam bentuk tulisan utuh. Kerangka tulisan juga akan membantu agar fokus penulisan esai tidak melebar dengan memasukkan informasi-informasi yang tidak dibutuhkan.

Sebuah esai selalu meliputi sebuah **pendahuluan di mana penulis menyebutkan tujuan penulisan terkait sebuah topik tertentu—mengapa tulisannya menarik untuk dibaca, argumen utama penulis dan alur pembahasannya; diikuti dengan bagian isi atau diskusi mengenai topik yang diangkat; kemudian terakhir, ditutup dengan kesimpulan**. Sama seperti dalam menulis ringkasan, esai disusun rata kanan-kiri dengan awal paragraf yang menjorok ke dalam. Font yang digunakan adalah Times New Roman, ukuran 12, dan spasi 1,5. Setiap halaman juga diberi nomor untuk memastikan jumlah halaman tidak melebihi batas yang diminta oleh dosen. Berikut adalah contoh esai:

Tugas II MK THI 2015 - Esai

Nama : Andi Natanael
NIM : 1456789012



Meninjau Dimensi *Power* dalam Media Kontemporer

Pendahuluan

The media affects what people think about themselves and how they perceive people as well.

What we think about self-image and what others should look like comes from the media.

McGaughey 2000

Istilah ‘media’ atau ‘medium’ digunakan untuk pertama kali pada model komunikasi menurut Harold Dwight Lasswell pada tahun 1948. Lasswell saat itu menulis berdasarkan pengalamannya semasa Perang Dunia II—di mana praktik-praktik propaganda masyarakat sangat kencang dilakukan oleh pemerintahnya—bahwa komunikasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang menjelaskan *who, says what, in which channel, to whom, with what effect*.

‘Who’ mengacu pada sumber/komunikator sebagai pelaku utama/pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi; hal ini dapat dilakukan oleh seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara. ‘Says What’ mengacu kepada pesan apa yang disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima, dari sumber/pengirim informasi. Pesan dapat berbentuk seperangkat simbol verbal/non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan/maksud si pengirim informasi tadi. Terdapat tiga komponen penting pesan menurut Lasswell, yaitu: makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk/organisasi pesan. ‘In Which Channel’ mengacu pada saluran/media sebagai wahana/alat untuk menyampaikan pesan dari pengirim informasi kepada penerima, baik secara langsung (bertatap muka), maupun tidak langsung (melalui media cetak/elektronik, dan lain-lain). ‘To Whom?’ mengacu kepada siapa pesan disampaikan, pihak ini dapat diwakili oleh individu, kelompok/organisasi, maupun suatu negara. Dalam model Lasswell, penerima pesan telah lebih luas dipahami sebagai khalayak (*audience*), tidak terbatas pada pendengar (*listeners*), daripada model komunikasi yang berkembang sebelumnya melalui tokoh Aristoteles. Sedangkan ‘With What Effect’ mengacu pada dampak/efek yang terjadi pada penerima pesan/informasi setelah menerima pesan tertentu dari si pengirim, misalnya terjadi perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain-lain.

Ketika menuliskan model komunikasi di atas, Lasswell tidak akan menyangka bahwa pada dekade-dekade selanjutnya, perkembangan media akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi sedemikian signifikan dalam memahami dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa media pada levelnya yang fantastis saat ini, di mana media mampu menjadi perantara bagi sejumlah—sangat—besar aktor dalam proses komunikasi (yakni berjuta-juta orang di seluruh dunia akibat penemuan internet, misalnya), dan juga dengan membawa sejumlah besar informasi mengenai berbagai hal, dalam waktu yang sedemikian singkat. Perkembangan penting lainnya yang tidak dilihat Lasswell saat itu ialah bahwa media tak lagi hanya berperan sebagai unsur pasif dalam proses komunikasi—sebagai medium (*channel*)—tetapi yang kemudian mampu berperan sebagai aktor/pihak aktif dalam proses komunikasi; sehingga media tidak lagi hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga *mampu* berperan sebagai pengirim dan penerima pesan yang disampaikan oleh kedua pihak lainnya ('*Who*' dan '*Whom*' dalam model Lasswell), dengan maksud tertentu pula.

Perkembangan dan penyesuaian-penyesuaian terhadap media ini terjadi begitu saja tanpa masyarakat benar-benar menyadarinya. Sementara pemahaman akan efek yang ditimbulkannya baru didapat kemudian, sehingga masyarakat seolah panik saat melihat munculnya masalah-masalah sosial baru akibat perkembangan teknologi informasi dan peran baru media tersebut. Amerika Serikat sebagai negara yang cenderung proaktif dalam kebijakan pemerintahannya pun tampak tergesa-gesa mengantisipasi isu ini dalam masyarakatnya ketika dokumen-dokumen politik dan diplomatik negara terpublikasi secara luas lewat situs WikiLeaks. Di Indonesia pun telah muncul situs senada yang bernama IndoLeaks, walaupun hingga saat ini gaungnya tidak sekeras yang ditimbulkan oleh WikiLeaks. Namun demikian, pada hakikatnya isu yang sama sedang dihadapi oleh Indonesia (dan juga negara-negara lainnya). Yakni ketika hal-hal yang dahulu dilihat oleh masyarakat termasuk ke dalam ranah privat (misalnya pada kasus-kasus tersebut adalah ranah privat negara); kini akibat perkembangan dari 'media', hal-hal itu telah bergeser ke ranah publik dengan mulusnya dan menghasilkan efek-efek yang tidak diinginkan (atau merugikan) pihak tertentu dalam masyarakat. Misalnya saja pada kasus Prita Mulyasari beberapa tahun lalu yang dianggap merugikan pihak RS Omni Internasional, ataupun kasus lain yang melibatkan Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II Dipo Alam.

Tulisan ini tidak ditujukan untuk mengukur seberapa jauh seharusnya media menyediakan akses ke ranah privat suatu aktor kepada khalayak umum atas nama tertentu,

seperti demokrasi. Melalui kasus di atas, penulis justru menemukan bahwa media memang mempunyai kapasitas (*power*) yang sedemikian besar untuk memengaruhi masyarakat seperti yang disebutkan dalam kutipan dari William McGaughey di awal uraian ini. Karena terbukti, bahwa hal itu telah membuat aktor-aktor kuat dalam hubungan sosial-masyarakat menjadi sangat antisipatif atas efek yang ditimbulkan oleh media. Karenanya, melalui tulisan ini, penulis berusaha memahami dimensi *power* yang dimiliki oleh media kontemporer, terutama 'media' yang teridentifikasi melalui perkembangan iptek dan perubahan peran dalam proses komunikasi seperti yang telah disebutkan oleh penulis sebelumnya. Dalam pembahasan berikut, penulis akan membaginya ke dalam tiga bagian: pertama, penulis akan mencoba memahami media sebagai *power*; yang kedua, penulis akan berusaha meninjau dampak yang terjadi dalam masyarakat akibat kepemilikan *power* oleh media tersebut; terakhir penulis menutup tulisan ini dengan kesimpulan. Level analisis yang dirujuk oleh penulis dalam tulisan ini adalah pada tingkat sosial-masyarakat secara umum.

Media sebagai Sumber *Power*

Untuk memahami karakteristik *power* yang dimiliki oleh media, penulis merujuk pada tulisan J.P. Singh. Memahami karakteristik tersebut berarti memahami apa yang disebut oleh J.P. Singh (2002) sebagai "*who does what to whom*". Menurut Singh, *power* yang terkait dengan teknologi informasi tersebut mencakup tiga bentuk yang berbeda, dua di antaranya merupakan konsep *power* yang memang telah dikembangkan oleh para ilmuwan politik sebelumnya: *power* instrumental, struktural, dan *meta-power*. *Power* instrumental terkait dengan kemampuan pemilik *power* untuk memengaruhi suatu hasil akhir, ini berarti teknologi informasi menjadi pendorong untuk meningkatkan kapabilitas ini. Sedangkan menurut Sandra Braman (2002), bentuk *power* ini ditujukan untuk memengaruhi perilaku manusia dengan memanipulasi dunia material melalui *physical forces*.

Power struktural hampir sama dengan instrumental. *Power* bentuk ini terkait dengan kapabilitas untuk memengaruhi, hanya saja *power* struktural ditujukan pada aturan (*rules*) dan institusi yang menentukan (*govern*) hasil akhirnya. Singh menjelaskan bahwa interkoneksi jaringan, terjadinya *countermovement*, dan kesalingbergantungan telah menjadikan posisi hierarkis *power* yang berujung pada pilihan terbatas bagi instansi dalam masyarakat (*human agency*).

Terakhir, konsep *meta-power* adalah konsep yang dipikirkan oleh Singh sendiri dengan memperhatikan bahwa teknologi tidak hanya memengaruhi aktor dan isu yang ada di masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu input *knowledge* di mana interaksi yang saling terhubung antaraktor telah membentuk identitas aktor dan isu-isu yang ada dalam hubungan mereka juga—bukan sekedar memengaruhi. Sehingga media sebagai *meta-power* dipahami oleh Singh melalui bagaimana jaringan (*networks*) merupakan, mengatur, atau mengatur ulang identitas, kepentingan, dan institusi. Konsep *meta-power* dari Singh ini serupa dengan konsep *power* simbolik yang ditulis oleh Sandra Braman, di mana *power* adalah kemampuan untuk membentuk perilaku manusia dengan cara memanipulasi dunia materi, sosial, dan simbol melalui ide-ide, kata-kata, dan gambar.

Kritik terhadap Media

Tidak diragukan lagi kecanggihan jaringan teknologi saat ini mampu menata ulang lingkungan sosial dan politik masyarakat, mentransformasikan perdagangan global, merombak ulang tatanan masyarakat dan kebudayaan, serta mengubah formulasi kebijakan dan pengimplementasiannya. Dalam tulisannya, James N. Rosenau (2002) mendapati bahwa informasi dan teknologi informasi pada dasarnya bersifat netral. Mereka tidak memiliki preferensi atas nilai-nilai tertentu. Dengan demikian, ketika informasi maupun teknologi informasi menjadi terasa ‘agak’ netral, itu merupakan akibat preferensi masyarakat itu sendiri. Mereka menyisipkan nilai ke dalam informasi, atau membawa informasi ke dalam arena politik, sehingga kemudian entah memperbaiki atau justru memperburuk keadaan dalam masyarakat. Berangkat dari sifat netral informasi dan teknologinya tersebut, maka fokus penulis dalam melihat perkembangan media saat ini adalah terhadap aktor-aktor yang berada di belakang media.

Melihat bagaimana karakteristik *power* yang dimiliki oleh media, maka tidak sedikit aktor-aktor dalam masyarakat yang ingin menguasai atau mendapatkan akses ke media. Bagi aktor yang berkepentingan atas masyarakat, media menjadi sarana yang tepat untuk membentuk komunitas dalam masyarakat, menyatukan mereka, bahkan memecah mereka, bergantung pada tujuan pribadi aktor tersebut. Aktor-aktor itu bisa saja pebisnis, politisi, negara, ataupun tokoh masyarakat. Namun karena nilai ekonomi yang tinggi atas efektivitas kinerja media sebagai sarana untuk memengaruhi baik hasil akhir, aturan, maupun identitas dan kepentingan dalam masyarakat tersebut; maka kecenderungannya saat ini adalah mereka yang memiliki modal yang dapat menikmati semua *power* media itu.

Penulis melihat bahwa kecanggihan teknologi yang sangat terasa perkembangannya dalam dua dekade terakhir ini terjadi dengan mulus, sehingga masyarakat luas terkadang tidak menyadari bahwa teknologi informasi dapat digunakan untuk kepentingan bagi pihak-pihak tertentu. Terobosan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan ini dapat mendorong terjadinya simplifikasi dalam pemikiran masyarakat, sehingga seluruh informasi yang beredar diserap tanpa pertimbangan lebih lanjut, dan fenomena ini yang menambah dimensi *power* dalam sebuah media menjadi besar. Misalnya adalah karena kemudahan mengakses informasi setiap saat.

Kesimpulan

Sebagai penutup, penulis melihat bahwa dimensi *power* yang terdapat dalam media merupakan suatu perkembangan yang terjadi akibat terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi. Media memiliki kapasitas untuk memengaruhi masyarakat secara luas. Namun, walaupun di masa ini kecenderungan yang ada adalah penguasaan media oleh pihak-pihak yang memiliki modal; media hendaknya dilihat juga sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk memengaruhi aktor-aktor pemilik modal tersebut, mengingat dimensi *power* dalam media bersifat netral seperti yang dikatakan oleh Rosenau. Keberpihakan informasi menjadi baik atau buruk akan bergantung pada aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan informasi tersebut.

Daftar Referensi

- Braman, Sandra. 2002. "Meta-technologies, Relations, and Power." Dalam *Information Technologies and Global Politics*, diedit oleh J.P. Singh dan James Rosenau. New York: State University of New York.
- "Laswell's Model." Diakses pada 8 Maret 2011. <http://communicationtheory.org/laswells-model/comment-page-1/>.
- McGaughey, William. 2000. "The Impact of Cultural Technologies upon Public Experience." Dalam *Five Epochs of Civilization*. Minneapolis: Thistlerose Publication.
- Rosenau, James N. 2002. "Information Technologies and the Skills, Networks, and Structures that Sustain World Affairs." Dalam *Information Technologies and Global Politics*, diedit oleh J.P. Singh dan James Rosenau. New York: State University of New York.
- Singh, J. P. 2002. "Introduction: information Technologies and the Changing Scope of Global Power and Governance." Dalam *Information Technologies and Global Politics*, diedit oleh J.P. Singh dan James Rosenau. New York: State University of New York.

4. Makalah/Paper

Adalah versi pendek dari sebuah skripsi yang disusun dalam bentuk bab-bab yang terpisah: Bab I Pendahuluan, Bab II Pembahasan, dan Bab III Penutup. Dalam Bab I, mahasiswa/i menuliskan I.1 Latar Belakang, I.2 Pertanyaan Riset, dan I.3 Kerangka Pemikiran. Kerangka pemikiran diperlukan untuk membantu menjawab pertanyaan riset. Contoh makalah (ukuran tulisan telah diperkecil untuk keperluan sebagai contoh tulisan):

MAKALAH SEBAGAI TUGAS MATA KULIAH GLOBALISASI

PERAN MEDIA BAGI MASYARAKAT SIPIL

DI ERA INFORMASI:

PEMUDA SEBAGAI IKON PERGERAKAN DI INDONESIA



Disusun Oleh:

Andi Natanael 1456789012

Mario 1456789059

Yanti Amadea 1456789049

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Kristen Indonesia

2014

Abstrak

Makalah ini mengulas peran media dalam dinamika gerakan masyarakat sipil di Indonesia masa kini, yakni pada era informasi. Penulis berfokus pada tren perkawinan antara pemuda dan pergerakan yang belakangan ini diusung oleh berbagai media di Indonesia dengan target anak muda. Penulis akan melihat secara khusus pada *pop culture* yang berkembang untuk menganalisis bagaimana media, pasca-berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, memengaruhi pemberdayaan generasi muda Indonesia. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memetakan peran media bagi masyarakat sipil di era informasi; untuk mengetahui apakah strategi penjangkauan pemuda untuk menjadi ujung tombak masyarakat sipil telah cukup strategis untuk memaksimalkan peran masyarakat sipil sebagai pengawas, kritikus, katalis, dan penganjur bagi kepentingan mereka yang tidak atau kurang terwakili oleh kebijakan negara. Penulis berargumen bahwa pasca-berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, media dapat memengaruhi pemberdayaan masyarakat sipil khususnya generasi muda Indonesia dengan menginternalisasi pesan-pesan yang tersirat dalam budaya populer ke dalam konsep diri generasi muda, bahwa pemuda adalah agen perubahan sekaligus masa depan bangsa. Akan tetapi, penulis justru menemukan kecenderungan bahwa telah terjadi komodifikasi pemuda yang perlu diwaspadai, karena dapat mereduksi makna dari perubahan itu sendiri; dan bahwa sikap *reaktif*—bukan *responsif*—pemuda yang muncul akibat pengaruh media masih mendapat tanggapan yang minim dari negara.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Masyarakat sipil merupakan aktor baru dalam panggung politik, nasional maupun internasional. Namun demikian, signifikansi peran mereka semakin nyata saat ini. Masyarakat sipil terbukti mampu menantang identitas hegemonik, monopolistik, dan dominan dari negara, dengan merujuk pada peristiwa *people-power* di Filipina tahun 2001 lalu hingga Revolusi Mesir yang masih segar dalam ingatan. Di saat negara dilihat tak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, masyarakat sipil bergerak dan berusaha menjawab isu tersebut dari level *grass-root*. Pendekatan *bottom-up* ini umumnya didasari pemikiran bahwa pada tingkat

grass-root-lah, situasi yang sesungguhnya dapat dilihat, dipahami, dan dianalisis; dinilai secara rasional, untuk kemudian ditanggapi secara efektif.

Meluasnya ruang gerak masyarakat sipil dewasa ini tak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempermudah akses terhadap informasi dan komunikasi. Dengan karakteristik masyarakat sipil yang bekerja secara berjejaring—inilah kekuatan masyarakat sipil, yakni ketika jaringan yang terbentuk antarmasyarakat sipil di berbagai tempat, baik nasional maupun transnasional, menghasilkan daya ungkit untuk meningkatkan posisi tawar mereka di hadapan negara—maka, informasi dan komunikasi menjadi hal fundamental yang melandasi kinerja aktor ini. Untuk menyamakan derap masyarakat sipil yang pada umumnya bergerak secara sporadis, mereka pun menjadi akrab dengan media oleh karena media memfasilitasi terbentuknya jaringan antarmasyarakat sipil di berbagai tempat serta mampu menyinergikan kinerja mereka.

Karakteristik lain dari masyarakat sipil yang sekaligus menjadi kelemahan mereka ialah, bahwa mereka bukanlah negara yang memiliki legitimasi untuk mengambil kebijakan strategis. Terhadap para pengambil kebijakan tersebut, peran masyarakat sipil adalah sebagai pengawas, kritikus, katalis, dan penganjur bagi kepentingan mereka yang tidak atau kurang terwakili (Eigen 1998). Oleh karenanya, media juga berperan bagi masyarakat sipil untuk melibatkan lebih banyak pihak dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menghasilkan *daya tawar yang lebih besar* ketika membawa kepentingan mereka ke hadapan negara. Makalah ini akan mengulas peran media dalam dinamika gerakan masyarakat sipil, khususnya dalam ‘melibatkan lebih banyak pihak agar menghasilkan daya tawar yang lebih besar di hadapan negara’, pasca-berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

Era informasi merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk mengacu pada suatu periode yang bermula di akhir tahun 1990-an, dan dalam hal-hal tertentu berlangsung hingga saat ini. Periode ini ditandai dengan bertambahnya peran teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat. Perubahan yang paling terlihat selama periode ini adalah pertumbuhan internet, dan tempat menyimpan informasi lainnya; sistem transmisi, dan pemulihan (*retrieval*) dengan memakai computer (Ruben dan Stewart 2006, 28). Selama masa ini, media bersama dengan teknologi memungkinkan sumber dan penerima dalam komunikasi untuk menjalankan fungsi yang sebelumnya dianggap sulit, memerlukan waktu, dan bahkan tidak mungkin dilakukan. Pengaruh media baru dan layanan komunikasi dan informasi yang mereka ciptakan sangat besar terhadap masyarakat, hingga sulit untuk menemukan sebuah aspek dalam kehidupan

pribadi dan profesional seseorang yang tidak terpengaruh oleh mereka dengan cara-cara tertentu. Era informasi telah menambah peran media dalam kehidupan masyarakat, yakni bagaimana media memengaruhi perilaku manusia. Menurut penulis, inilah yang menjadi peluang bagi masyarakat sipil untuk mengundang lebih banyak pihak terlibat dalam isu yang mereka perjuangkan melalui media. Masyarakat sipil dapat mendorong lebih banyak orang untuk mengejar nilai-nilai sosial dan kepentingan umum yang penting bagi mereka (Brown, *et al.* 2001, 7).

Di Indonesia, gerakan masyarakat sipil saat ini banyak berupaya menjangkau kaum muda. Tren yang ada ialah menjadikan isu-isu sosial menjadi lebih populer dan akrab di telinga generasi muda melalui berbagai media. Beragam Lembaga Swadaya Masyarakat menargetkan kampanye mereka secara khusus kepada para remaja dan pemuda. Misalnya saja Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang mengkampanyekan gerakan peduli HAM dengan tema *Human Loves Human* melalui film oleh karena pendekatan film lebih banyak diminati anak muda (KontraS 2008). Selain institusi, ada pula tokoh-tokoh masyarakat seperti Pandji Pragiwaksono dan Wahyu Aditya yang bergerak secara individual untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran generasi muda. Dengan memanfaatkan peran media massa, yakni televisi, majalah, surat kabar, radio, film, dan yang pasti media *online* mereka berupaya untuk memberdayakan anak muda Indonesia sebagai bagian dari jawaban atas isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, pengemasan nilai-nilai sosial ke dalam budaya populer ini juga diharapkan dapat mendorong kaum muda Indonesia agar ikut serta memaksimalkan peran masyarakat sipil sebagai pengawas, kritikus, katalis, dan penganjur bagi perumus kebijakan.

I.2 Pertanyaan Permasalahan

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis hendak mengetahui **bagaimana media, pasca-berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, memengaruhi pemberdayaan masyarakat sipil khususnya generasi muda Indonesia?** Penulis berfokus pada tren perkawinan ide pemuda dan pergerakan yang belakangan ini diusung oleh berbagai media di Indonesia dengan target anak muda. Berbagai media merujuk pada periode era informasi di mana media massa dan media *online* telah menjadi bagian penting dalam keseharian masyarakat.

Pada bagian pembahasan, penulis akan menilik budaya populer yang ada pada kaum muda Indonesia terkait dengan ide pergerakan, kemudian melihat hasil komunikasi mediana;

apakah positif—dampak komunikasi pada penerima pesan sesuai dengan tujuan yang dimaksud si pengirim pesan, atau negatif—dampak pada penerima pesan *tidak* sesuai dengan tujuan yang dimaksud si pengirim pesan. Dari situ, penulis akan menganalisis bagaimana media berkontribusi terhadap pemberdayaan kaum muda sebagai masyarakat sipil di Indonesia dan kemudian secara singkat mengambil kasus paralelnya, yakni pemberdayaan kaum muda sebagai agen perubahan oleh aktor-aktor internasional, untuk melihat spektrum dari isu ini di tingkat global. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memetakan peran media bagi masyarakat sipil di era informasi ini, untuk mengetahui apakah strategi penjangkauan pemuda untuk menjadi ujung tombak masyarakat sipil telah cukup strategis untuk memaksimalkan peran masyarakat sipil sebagai pengawas, kritikus, katalis, dan penganjur bagi kepentingan mereka yang tidak atau kurang terwakili oleh kebijakan negara.

I.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dipakai adalah tulisan Karen T. Litfin (2002) dalam *Public Eyes: Satellite Imagery, the Globalization of Transparency, and New Networks of Surveillance*. Pengaruh perubahan teknologi atas politik internasional terjadi dalam dua jalur analisis berbeda. Dari perspektif instrumental, teknologi baru dapat memberdayakan (*empower*) atau melemahkan (*disempower*) aktor sosial—negara, kelompok sosial, kelas, dan institusi. Pada tingkat yang lebih mendasar, meski mungkin kurang terlihat, teknologi dapat memengaruhi pemahaman diri dan identitas aktor sosial dan mungkin bahkan sifat dari *power* itu sendiri.

Karen T. Litfin memiliki empat argumen dalam tulisannya mengenai citra satelit (*satellite imagery*) dan globalisasi transparansi yang saling berhubungan. Pertama, aktor-aktor non-negara (perusahaan, organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah) semakin menjadi signifikan sebagai penyedia dan pengguna citra satelit. Kedua, pengaruh sosial dan politis pencitraan satelit dapat terjadi melalui operasi kekuasaan disipliner, artinya kesadaran bahwa aksi seseorang sedang diperhatikan dapat memicu internalisasi pandangan dari orang lain. Ketiga, sirkulasi kekuasaan disipliner dapat membuka kemungkinan baru mengenai persepsi keamanan bersama dan bahkan beberapa unsur pembentuk identitas kolektif. Terakhir, dengan memetakan argumen kedua dan ketiga ke argumen pertama, menurut Litfin pemberdayaan organisasi non-pemerintah melalui teknologi informasi dapat membuka jalur baru pembentukan identitas kolektif secara serentak bahkan ketika memperkuat sirkulasi kekuasaan disipliner. Litfin menyebutkan, difusi teknologi penginderaan jauh telah

menghasilkan pergeseran penting dalam dua dimensi *power*: instrumental dan konstitutif. *Power* instrumental terkait dengan kemampuan pemiliknya untuk memengaruhi suatu hasil akhir. Dalam hal ini, teknologi informasi berperan menjadi semacam pendorong yang meningkatkan kapabilitas si pemilik untuk memengaruhi sebuah hasil akhir. Sehingga kini siapapun aktornya, ia dapat menggunakan teknologi informasi untuk memengaruhi hasil akhir bagi banyak orang. Sedangkan *power* konstitutif, atau yang disebut J. P. Singh sebagai *meta-power*, berarti kemampuan teknologi informasi untuk mendorong pembentukan identitas dan agenda baru dalam masyarakat. Teknologi bukan hanya mampu memengaruhi aktor dan isu yang ada di masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu *input knowledge* di mana interaksi yang saling terhubung antaraktor akan membentuk identitas aktor dan isu-isu yang ada di dalam masyarakat.

Litfin melihat pergeseran pemahaman diri aktor sosial dan sifat *power* mampu memengaruhi politik dunia. Akses ke citra satelit, akan meningkatkan partisipasi para aktor yang tereksklusi sebelumnya. Pengaruh yang lebih mendasar ialah bahwa pandangan disipliner tentang ruang spionase tidak lagi menjadi milik negara, tetapi semakin tersebar di seluruh level sosial dan politis. Daripada berinvestasi pada suatu-pusat-istimewa yang tunggal dengan ‘tatapan panoptis’, teknologi informasi justru cenderung memfasilitasi pertumbuhan sebuah ‘jaring pengawasan yang tersebar’.

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 Budaya Populer Era Informasi: Peran Media dalam Memberdayakan Pemuda di Era Informasi

Seperti yang dikatakan oleh Karen T. Litfin, difusi jaringan pengawasan yang berasosiasi dengan penyebaran citra satelit telah menyebabkan bertambah panjangnya daftar aktor-aktor non-negara dalam suatu proyek sosial mengenai ‘prediksi dan kontrol’ dalam skala besar dan terkait dengan modernitas. Citra satelit berfungsi secara serentak sebagai gejala, ekspresi, dan penguatan mimpi modernitas akan pengetahuan (*knowledge*) sebagai *power* (Litfin 2002, 85). Ini didukung dengan pandangan Gaye Tuchman (1978, 180) bahwa ‘*knowledge imposes a frame for defining and constructing social reality.*’ Pertanyaannya

berikutnya, apa pengetahuan yang ditawarkan oleh media? Menurut penulis, salah satu pengetahuan yang ditawarkan oleh media saat ini adalah ide tentang pergerakan pemuda.

Teknologi dan media modern adalah faktor penting dalam perkembangan generasi muda secara umum di seluruh dunia. Media massa memungkinkan lahir dan bertumbuhnya budaya anak muda (*youth culture*) yang menyebar dengan cepat ke seluruh belahan dunia, meniadakan batasan kelas, etnis, dan geografis. Dalam televisi, sinetron/drama remaja, iklan, hingga budaya pop ala MTV ditunjukkan, kalau bukan dipropagandakan, suatu ‘budaya anak muda’ ke seluruh dunia. Hal yang sama juga dapat ditemukan pada majalah-majalah remaja/pemuda, novel, film-film, dan pastinya jaringan-jaringan situs internet yang terus meningkat jumlahnya. Di Indonesia sendiri, penulis mendapati bahwa saat ini sedang ada tren untuk memberdayakan generasi muda melalui media, bahwa anak muda merupakan masa depan suatu bangsa. Ide bahwa pemuda merupakan generasi penerus bangsa begitu diminati dan disukai kelompok populis. Hal ini ditunjukkan melalui banyaknya tokoh-tokoh masyarakat yang tergolong muda dan dikagumi oleh; tak hanya generasi muda itu sendiri, tetapi juga generasi di atasnya.

Meskipun terkesan ‘kalah pamor’ dibandingkan isu-isu lain seperti isu sosial politik atau bahkan pemberitaan tentang selebriti yang mayoritas diminati oleh orang Indonesia (dilihat dari banyaknya program televisi yang membahas kedua isu tersebut), namun munculnya tren pemberdayaan generasi muda ini tidak dapat diingkari. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya program di berbagai media ataupun proyek nasional yang melibatkan remaja dan pemuda Indonesia. Program ataupun proyek ini juga direspon secara positif oleh masyarakat luas. Media elektronik semakin banyak mengekspos anak muda mulai dari hiburan hingga untuk suatu isu yang serius seperti isu sosial-politik, namun dikemas dalam bahasa yang tidak berat. Media cetak seperti majalah dan koran juga semakin banyak menjangkau anak muda untuk terlibat dalam isu-isu sosial dengan tujuan meningkatkan kepekaan generasi muda bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia yang juga memiliki tanggung jawab atas pembangunan Indonesia.

Di Metro TV tahun 2010-2012 terdapat program ‘*Provocative Proactive*’, yang menurut *host* utamanya, Pandji Pragiwaksono, memiliki misi edukasi politik untuk anak muda sehingga acara *talk show* politik ini sengaja dibuat *fun*. Acara musik Dahsyat di RCTI yang muncul sejak tahun 2008 seringkali menampilkan nilai-nilai nasionalisme dalam generasi muda sebagai sesuatu yang membanggakan. Koran nasional, seperti Kompas, memiliki segmen

yang ditujukan bagi anak muda: Kompas Kampus. Majalah-majalah remaja nasional seperti ‘Cosmogirl! Indonesia’, ‘Gogirl’, serta majalah Gadis; tiga majalah remaja yang paling sering penulis temukan diminati oleh para remaja, juga secara rutin memasukkan isu tentang *youth* dan tidak lupa menampilkan artikel tentang anak muda yang memberi inspirasi. Belum lagi berbagai siaran radio, film, novel, situs-situs internet, dan lainnya yang bertemakan *youth as an agent of change* dan sering penulis temukan secara sengaja ataupun tidak sengaja di tengah rutinitas kegiatan sehari-hari.

Sedangkan proyek nasional yang melibatkan generasi muda Indonesia misalnya *Indonesian Youth Conference (IYC)*, yang diadakan pertama kali pada tahun 2010 dan dilakukan setiap tahun setelahnya. IYC menurut *founder*-nya adalah sebuah wadah di mana anak muda Indonesia dapat menyampaikan aspirasi dan ide mereka, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk benar-benar “didengar” (IYC 2011). Selain IYC, konferensi nasional lain yang juga melibatkan generasi muda Indonesia dari berbagai daerah adalah Parlemen Muda yang akan diselenggarakan pada tahun 2012 (PM 2011). Penulis melihat hal tersebut sebagai upaya pengembangan peran dan fungsi masyarakat sipil di Indonesia. Dengan adanya berbagai isu politis yang melibatkan ‘generasi tua’ di atas kursi pemerintahan—dan yang tengah makin menggerakkan publik saat ini—generasi muda terlihat *fresh* dan mampu menyediakan tempat tersendiri dalam harapan masyarakat akan masa depan bangsa yang cerah.

II.2 Hasil Komunikasi Media?

Berangkat dari pemikiran Karen T. Litfin, bahwa teknologi baru dapat memberdayakan (*empower*) atau melemahkan (*disempower*) aktor sosial—negara, kelompok sosial, kelas, dan institusi secara instrumental, dan pada tingkat yang lebih mendasar, teknologi dapat memengaruhi pemahaman diri dan identitas aktor sosial. Maka dengan masifnya peran media dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, secara khusus terhadap generasi muda yang didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi, penulis melihat bahwa media *memang* telah berhasil memengaruhi pemahaman diri dan identitas aktor sosial—dalam hal ini generasi muda Indonesia. Proses internalisasi pengaruh media itu terjadi karena teknologi informasi memiliki *meta-power* atau *constructive power* (Litfin 2002, 66). Hal kedua yang juga penting dari *meta-power* media yang berbasis teknologi informasi adalah kemampuannya mendorong pembentukan identitas dan agenda baru dalam masyarakat. Teknologi bukan hanya mampu memengaruhi aktor dan isu yang ada di masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu *input knowledge* di mana interaksi yang saling terhubung antaraktor akan membentuk identitas aktor

dan isu-isu yang ada di dalam masyarakat. Bagaimana dengan media yang membawa pesan pergerakan pemuda ini? Apakah berhasil membawa daya ungkit bagi posisi masyarakat sipil di hadapan negara?

Menurut Brent D. Luben dan Lea P. Stewart, komunikasi yang dipahami dengan menekankan perspektif sumber pesannya, (dalam hal ini adalah media—mengingat pada perkembangannya media dapat berperan sebagai aktor dan bukan lagi terbatas sebagai *medium* dengan adanya proses *gatekeeping* yang dilakukan oleh editor terhadap berbagai informasi) dan juga perspektif penerima pesannya, dapat dibagi menjadi dua (Ruben dan Stewart 2006, 14): komunikasi positif dan komunikasi negatif. Komunikasi positif mengacu pada ‘*those circumstances where a listener got the message the sender in mind.*’ Sedangkan komunikasi negatif ialah ketika pengaruh yang terjadi pada si pendengar tidak sesuai dengan maksud si penyampai pesan. Dengan masifnya pemberitaan media selama ini, apakah hasil dari komunikasi media tersebut terhadap generasi muda? Apakah bentuk komunikasinya positif atau negatif? Menurut penulis, hasil secara kuantitatif akan dapat menjadi barometer apakah bentuk komunikasi media terhadap generasi muda khususnya, adalah positif atau negatif. Namun, penulis melalui makalah ini akan mencoba menganalisis secara kualitatif dengan menilik ke dalam gejala-gejala budaya populer yang ada di masyarakat.

Penulis melihat ide bahwa pemuda mampu menjadi agen perubahan telah ‘bertebaran’ di sekitar masyarakat—setidaknya di sekitar masyarakat yang berpendidikan. Penulis menyadari ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menilik budaya populer pergerakan pemuda ini. Kedua hal ini cenderung memberikan kesan pesimis terhadap peran media dalam memengaruhi pemberdayaan masyarakat sipil, khususnya generasi muda, Indonesia. Pertama, bahwa internalisasi pandangan ‘pemuda adalah agen perubahan’ ini umumnya ditemukan pada masyarakat di kota besar, di mana anak mudanya cenderung lebih aktif dengan beragam akses yang memfasilitasi kegiatan mereka; dan kedua, bahwa pemberitaan dengan pesan-pesan pergerakan pemuda ini umumnya dilakukan oleh media secara sadar bahwa target khalayak mereka nantinya adalah kelas sosial menengah ke atas—dengan mengamati gaya bahasa yang dipakai oleh media tersebut, misalnya dengan menggunakan bahasa yang baku dan formal atau bahasa sehari-hari tetapi juga menyertakan bahasa asing (Bahasa Inggris), yang mana tidak semua kelas sosial menggunakannya.

Meski demikian, terdapat pertimbangan lain yang lebih optimis akan peran media ini. Pergerakan pemuda di Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Sejak masa pra-kemerdekaan,

generasi muda sudah menjadi tulang punggung negara ini. Sehingga ketika ini era informasi memungkinkan media untuk memompa semangat pergerakan pemuda, seharusnya ide itu dengan mudah diterima dan direspon oleh khalayak umum di Indonesia; tidak hanya oleh generasi muda masa kini—karena generasi di atasnya yang justru lebih dulu mengalami pergerakan pemuda di masa reformasi dan masa-masa sebelumnya, pasti akan *lebih* memahami pentingnya peran generasi muda dalam menentukan masa depan bangsa—tapi juga generasi-generasi di atasnya. Sehingga, seharusnya lagi, peran masyarakat sipil sebagai pengawas, kritikus, katalis, dan penganjur bagi perumus kebijakan, kini banyak dimotori oleh generasi muda Indonesia yang menerima pesan tersebut.

Apa yang terjadi jika pada kenyataannya ini, generasi muda seolah tidak merespon pesan tersebut? Penulis melihat bahwa memang generasi muda ini cukup memiliki kesadaran akan isu-isu sosial dan politik yang terjadi di negaranya. Namun, kesadaran ini tidak *cukup* untuk membuat mereka menjadi *agent of change*. Kesadaran bahwa generasi muda adalah agen perubahan sudah *ada* di sana, seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, bahwa frase ‘*youth as agent of change*’ telah sering dipakai dan didengar oleh anak muda Indonesia. Tetapi, kesadaran itu tidak cukup untuk mendatangkan aksi *riil* anak muda sebagai bagian dari masyarakat sipil, harapan dari masyarakat sipil untuk dapat menjawab isu-isu sosial-politik dari level *grass-root* apalagi untuk meningkatkan daya tawar masyarakat sipil di hadapan negara. Akibat teknologi informasi dan komunikasi, pemuda justru dikomodifikasi sebagai agen perubahan tanpa dapat memberikan daya tawar lebih bagi masyarakat sipil di hadapan negara. Analisis terhadap kedua hal ini akan dijelaskan lebih lanjut kemudian.

II.3 *Communicative Capitalism* dalam Budaya Populer

Berbagai acara, artikel, program radio, ataupun situs internet yang membawa pesan pergerakan pemuda diterima sebagai bagian dari hiburan. Nilai-nilai bahwa generasi muda adalah agen perubahan disukai oleh masyarakat. Masyarakat luas cukup menyukai peran media yang membawakan pesan-pesan tersebut, misalnya tayangan *Provocative Proactive* berhasil menjadi *trending topic* di Twitter beberapa kali. Kesuksesan Festival dan forum *Indonesian Youth Conference* tahun 2010 sehingga konferensi ini diadakan lagi untuk kedua kalinya dengan topik-topik yang paling diminati oleh pengunjung Festival IYC 2010, yaitu pendidikan, lingkungan, diplomasi, sudut pembaharuan, anti-korupsi, budaya, aktivisme, kewirausahaan, dan politik. Akan tetapi, setelah nilai-nilai ini disukai oleh masyarakat, pertanyaannya adalah: lantas apa yang terjadi? Apakah berhenti sampai di situ saja? Dari sini, penulis melihat bahwa

menjadikan pergerakan pemuda sebagai budaya populer ternyata tidak menjamin bahwa pemuda akan *bergerak*, memberikan *respon* terhadap isu-isu sosial-politik yang ada di masyarakat. Untuk memahami hal tersebut, penulis menggunakan argumen Jodi Dean (2005) mengenai *communicative capitalism*.

Teknologi informasi dan komunikasi di era informasi ini telah memengaruhi pemuda dan membuatnya *reaktif* terhadap pesan pergerakan yang ditujukan kepada mereka. Tetapi menjadi *reaktif* berbeda dengan *merespon*. Diterimanya ide ‘pergerakan pemuda’ yang dibawa oleh media kepada masyarakat luas sebagai budaya populer, sesuatu yang diminati oleh kelompok populis, menunjukkan bahwa media telah memengaruhi masyarakat untuk menjadi reaktif terhadap isu pergerakan pemuda. Lantas, mengapa tidak terjadi respon? Dan kalau pun ada, mengapa jumlahnya tidak signifikan jumlah media yang membawa pesan pergerakan pemuda—baik media massa maupun media *online*?

Menurut Jodi Dean, teknologi informasi telah menyebabkan ‘pesan’ itu justru tenggelam di dalam mediumnya. Pesan itu ada, dan tersirkulasi dalam jaringan komunikasi global yang intensif dan padat, tetapi menanggalkan penerimanya dari kewajiban untuk merespon (Dean 2005, 53). Dean juga menyorot kecenderungan pada masyarakat di era informasi ini, yang melihat ‘pasar’ sebagai wadah aspirasi demokrasi, atau apa yang disebut beliau sebagai *communicative capitalism*. Dengan argumen ini, dapat dipahami mengapa Festival IYC 2010 ramai dikunjungi oleh anak muda, tetapi, mereka yang terlibat dalam forumnya jauh lebih sedikit. Mereka yang terlibat dalam forum wajib mempresentasikan proyek riil mereka terkait isu sosial yang mereka minati, peserta forum IYC 2010 berjumlah enam orang. Sedangkan mereka yang berpartisipasi dalam Festival cukup membayar kontribusi berupa tiket masuk; dan dengan menjadi peserta yang membayar tiket masuk Festival, para generasi muda ini seolah-olah telah memberikan kontribusi sebagai agen perubahan. Sebagai catatan tambahan, jumlah peserta festival cukup melimpah sehingga IYC 2011 diadakan di lokasi yang berbeda dari lokasi tahun lalu. Hal yang sama terjadi dengan media-media massa yang membawa ide pergerakan pemuda. Mereka yang menggemari—ditunjukkan dengan cara membeli, membaca, menonton, mendengarkan—media massa tersebut seolah telah memberikan aspirasinya dan telah menjadi bagian dari agen perubahan itu sendiri tanpa perlu benar-benar bergerak untuk mengubah.

Dalam *communicative capitalism*, bentuk komunikasi tidaklah dipahami dalam bentuk pesan, dan respon terhadap pesan. Kelimpahan informasi (pesan mengenai pergerakan pemuda

oleh media) yang diterima masyarakat hari ini melalui media, adalah akibat jaringan komunikasi global yang dibawa oleh teknologi komunikasi informasi. Akibatnya, pesan dalam jaringan komunikasi yang kompleks ini kemudian mengundang kontribusi untuk mengedarkan ‘isi’—bukan kontribusi aksi sebagai respon atas ‘isi’ pesan tersebut. Sehingga, dengan menceritakan pengalaman bahwa seseorang menyukai dan mengerti pesan yang disampaikan oleh media, maka seseorang ini jadi merasa telah berkontribusi, walaupun bukan merespon pesan, melainkan sekedar mereproduksi pesannya. Ini disebut Dean sebagai fantasi ‘kelimpahan’. Sedangkan, dalam media *online* secara khusus; kini menurut Jodi Dean terbentuk semacam fantasi partisipasi, melalui ‘pemujaan terhadap teknologi’. Menurut Dean (2005, 60), *‘contributing to the infostream, has a subjective registration effect. One believes that it matters, that it contributes, that it means something.* Di sini, penulis mendapati bahwa apa yang penulis telah temukan sebelumnya, yakni melihat kepopuleran ide generasi muda sebagai pembawa perubahan dalam media *online* selama ini, justru sebenarnya merupakan gambaran jelas dari fantasi partisipasi itu sendiri. Jadi, apakah bentuk komunikasi media terkait pergerakan pemuda ini positif atau negatif secara kualitas? Menurut penulis jawabannya ada di antara keduanya. Sebab, teknologi komunikasi dan informasi dalam *communicative capitalisme* telah menggeser pemaknaan terhadap komunikasi itu sendiri, sehingga muncul fantasi kelimpahan dan fantasi partisipasi di antara penerima pesan media sekarang ini, khususnya mereka yang paling diharapkan untuk merespon pesan: para generasi muda Indonesia.

II.4 Pemuda di antara Masyarakat Sipil: Komodifikasi Pemuda sebagai Ikon Pergerakan di Indonesia

Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah: bagaimana pengaruh teknologi komunikasi dan informasi bagi masyarakat (sipil) luas dalam memandang pemuda paska ide pemberdayaan pemuda diterima secara populer di Indonesia belakangan ini? Penulis melihat bahwa masifnya informasi yang diterima masyarakat mengenai pemuda telah menjadikan pemuda sebagai ikon (*icon*) perubahan itu sendiri. Menurut Marshall Fishwick dan Ray Browne (1970, 1), suatu ikon adalah ide dan gambaran yang diubah ke dalam tiga dimensi: *admired artifacts, external expressions of internal convictions, and every day things that make every day meaningful.* Dengan definisi ini, penulis melihat bahwa pemuda sebagai ikon perubahan berarti memandang pemuda atau generasi muda sebagai artefak yang dikagumi, masyarakat luas memiliki keyakinan atas generasi muda yang mampu melakukan perubahan, dan bahwa setiap kegiatan pemuda menjadi bermakna di hadapan masyarakat.

Memiliki keyakinan penuh bahwa pemuda-lah yang akan membawa perubahan mendorong terjadinya komodifikasi terhadap ‘generasi muda’. Misalnya saja, ketika para ‘mahasiswa’ berdemonstrasi, masyarakat akan menilai mereka tengah menjalankan tugasnya sebagai ‘agen perubahan’, tanpa benar-benar melihat apakah mereka benar-benar menghasilkan perubahan. Akibatnya, harapan bahwa pemuda akan menjadi ujung tombak bagi masyarakat sipil dalam menjawab isu-isu sosial-politis dari level *grass-root* seolah telah ‘dicukupkan’ hanya dengan memperhatikan, mengagumi, dan meyakini bahwa pemuda dalam segala kegiatannya telah menjadi agen perubahan. Di sisi lain, menjadikan pemuda sebagai ikon perubahan juga telah mereduksi makna ‘perubahan’ itu sendiri, menurut penulis. Hal ini dikarenakan, setiap aktor dalam masyarakat sebenarnya dapat menjadi agen perubahan, dan *tidak terbatas* pada generasi muda saja.

II.5 Pemuda di Hadapan Negara: Jaring Pengawasan yang Tersebar namun Tidak Menekan Negara

Pertanyaan berikutnya, terkait apakah budaya populer yang terbentuk dari media telah berhasil meningkatkan daya tawar masyarakat sipil di hadapan negara? Meningkatnya kesadaran pemuda akan isu-isu sosial-politis di sekelilingnya yang dibuktikan dengan menjadi *reaktif* terhadap pesan-pesan pergerakan yang dibawa oleh media dapat dilihat sebagai meluasnya jaring-jaring pengawasan terhadap kinerja negara yang adalah aktor pengambil kebijakan strategis harapan masyarakat (*seharusnya*). Jaring-jaring pengawasan ini adalah citra satelit (*satellite imagery*) yang muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Meski demikian, menurut penulis, tersebarnya jaring pengawasan ini tidaklah signifikan untuk menjadi pengawas yang mampu menekan negara.

Hal ini juga telah diargumentasikan oleh Jodi Dean, bahwa dengan adanya citra satelit milik masyarakat yang bertujuan sipil maupun komersil, hal itu memang telah memotong kemampuan negara untuk mengekspos kendali dan otoritasnya. Tetapi, akhir dari monopoli *power* dalam bidang pengawasan tidak serta-merta melemahkan negara, hanya saja ia telah membawa aktor-aktor baru yang sebelumnya tereksklusi oleh kemampuan monopoli negara tersebut (Dean 2005, 85). Negara masih menikmati kontrol bahkan dalam wajah komersialisasi oleh karena kemampuan mereka untuk melisensi satelit-satelit komersial, mengatur hukum, bahkan jika diperlukan menutup citra satelit milik masyarakat. Jaring pengawasan baru memang telah menggeser posisi negara dari monopoli pengawasan, akan tetapi ia sama sekali tidak melemahkan negara.

Penulis juga melihat hal lain yang menguatkan argumentasi bahwa jaring pengawasan masyarakat sipil melalui budaya populer pergerakan pemuda ini tidaklah signifikan untuk meningkatkan daya ungkit masyarakat dari dalam (secara domestik) terhadap negara. Sebab, apa yang membedakan ritual kosong dan partisipasi yang riil di hadapan negara adalah hak untuk bersuara secara legal. Sementara, sampai saat ini, belum ada hak semacam itu bagi pemuda di hadapan negara. Sekencang apapun mereka berteriak, selama negara tidak merasa wajib untuk mendengar, maka daya ungkit ini akan menguap seketika. Hal ini kemudian memberi pertanyaan baru bagi penulis, jika menyebarkan jaring pengawasan baru tidak memberikan daya ungkit bagi negara apakah pemberdayaan pemuda sebagai daya ungkit bagi masyarakat sipil melalui media masih memiliki optimisme untuk diwujudkan? Pada akhirnya, penulis tetap menjawab ya, dengan mengingat kemampuan masyarakat sipil untuk menantang identitas hegemonik negara melalui peristiwa-peristiwa yang telah disebut penulis di awal makalah ini: *People Power* dan Revolusi Mesir.

II.6 Spektrum Kasus Serupa di Tingkat Global: MTV

Penulis menyadari bahwa masuknya tema-tema pemuda sebagai '*Agent of Change*' ke dalam media juga bukan tanpa sebab. MTV adalah salah satu aktor yang mempelopori penyebaran pesan tersebut di Indonesia. MTV mampu menciptakan budaya pemuda (*youth culture*) yang dikenal dengan citra enerjik, fun, namun juga peduli. Melalui konser-konser musik yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu, MTV mengajak anak muda untuk bergabung dan berkontribusi sebagai bagian dari budaya pemuda itu sendiri. Bahwa pemuda peduli dan mampu menjadi jawaban atas isu sosial di sekitarnya. Namun demikian, hal yang sama juga perlu dipertanyakan: apakah dengan menyukai/menggemari MTV dan berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan pemudanya maka para anak muda dapat dikatakan sebagai agen perubahan? Penulis membaca pola yang sama, bahwa generasi muda didorong untuk menjadi *reaktif* terhadap pesan-pesan yang dibawa oleh MTV untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya, namun demikian *bukan* berarti mereka *memberikan respon* atas pesan tersebut.

BAB III

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa pasca-berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, media memengaruhi pemberdayaan masyarakat sipil khususnya generasi muda Indonesia dengan menginternalisasi pesan-pesan yang tersirat dalam budaya populer ke dalam konsep diri generasi muda, bahwa pemuda adalah agen perubahan sekaligus masa depan bangsa. Namun demikian, hasil komunikasi yang diharapkan, yakni peran pemuda sebagai motor masyarakat sipil untuk menjawab isu-isu sosial-politis di masyarakat ataupun sebagai daya ungkit posisi masyarakat sipil di hadapan negara tidaklah signifikan peran media dalam membentuk budaya populer tersebut. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran bentuk respon atas pesan dalam era informasi, yang menurut Jodi Dean adalah era *communicative capitalism*. Bentuk respon atas pesan yang tersirkulasi dalam jaringan informasi yang padat itu bukan berupa tindakan partisipasi yang aktif, melainkan tindakan untuk semata-mata mereproduksi ulang pesan yang diterima oleh generasi muda sebagai target penerima pesan. Tak menjadi soal apakah mereka dapat memberikan kontribusi atau respon yang riil atas pesan tersebut, yang terpenting generasi muda sudah menjadi reaktif terhadap pesan yang dibawa oleh media.

Analisis lebih jauh memberi kesimpulan bahwa media telah mengkomodifikasi pemuda sebagai icon pergerakan, sementara jaring pengawasan baru oleh sikap reaktif pemuda memang telah menggeser posisi negara dari monopoli pengawasan; akan tetapi, ia sama sekali tidak melemahkan negara. Penulis tidak bermaksud menutup mata akan jumlah pemuda yang memang bergerak dan menjadi agen perubahan yang sesungguhnya selama ini. Namun demikian, bagi penulis, komodifikasi ini perlu diwaspadai karena dapat mereduksi makna dari perubahan itu sendiri. Tak hanya itu, perilaku negara yang *tidak merasa perlu memperhatikan jaring pengawasan baru* oleh sikap reaktif pemuda ini juga perlu disadari untuk mengevaluasi apakah strategi penjangkauan pemuda untuk menjadi ujung tombak masyarakat sipil cukup strategis untuk memaksimalkan peran masyarakat sipil sebagai pengawas, kritikus, katalis, dan penganjur bagi kepentingan mereka yang tidak atau kurang terwakili oleh kebijakan negara.

Pada akhirnya, penulis tetap berkeyakinan bahwa kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, yang muncul akibat pengaruh media sekarang ini terhadap isu-isu sosial dan politik juga tidak dapat dikesampingkan. Jika melihat tren ini terus berkembang hingga beberapa tahun ke depan, penulis masih optimis bahwa akan ada semakin banyak generasi

muda yang *mau* bergerak dan merespon pesan tersebut secara nyata sehingga generasi muda benar-benar dapat diharapkan untuk menjadi ujung tombak masyarakat sipil di Indonesia, dan juga di luar Indonesia.

Daftar Referensi

- Brown, L. David, Sanjeev Khagram, Mark H. Moore, dan Peter Frumkin. 2000. *Globalization, NGOs, and Multi-Sectoral Relations*. Working Paper #1. Diakses secara online dari http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=253110.
- Dean, Jodi. 2005. "Communicative Capitalism: Circulation and the Foreclosure of Politics." *Cultural Politics* 1 (1): 51-74. <https://doi.org/10.2752/174321905778054845>.
- Eigen, Peter. 1998. *The Role of Civil Society*, diakses secara online dari https://etico.iiep.unesco.org/sites/default/files/full_text_english.pdf.
- Fishwick, Marshall dan Ray B. Browne. 1970. *Icons of Popular Culture*. Ohio: Bowling Green University Popular Press.
- Indonesian Youth Conference. 2010. "The Story." About Us. Diakses pada 30 Mei 2011. <http://indonesianyouthconference.org/aboutus/the-story/>.
- KontraS. 2008. "Kampanye Human Loves Human." Terakhir diubah pada 4 Desember 2008. <https://kontras.org/2008/12/04/kampanye-human-loves-human/>
- Litfin, Karen T. 2002. "Public Eyes: Satellite Imagery, the Globalization of Transparency, and New Networks of Surveillance." Dalam *Information Technology and Global Politics: The Changing Scope of Power and Governance*, disunting oleh J. P. Singh dan James N. Rosenau, 65-89. New York: State University of New York Press.
- Parlemen Muda. Tanpa Tahun. "Tentang." Parlemen Muda. Diakses pada 30 Mei 2011. <https://parlemenmuda.wordpress.com>.
- Ruben, Brent D., dan Lea P. Stewart. 2006. *Communication and Human Behavior*. Edisi Kelima. Boston: Pearson Education.
- Tuchman, Gaye. 1978. *Making News: A Study in the Construction of Reality*. New York: The Free Press.

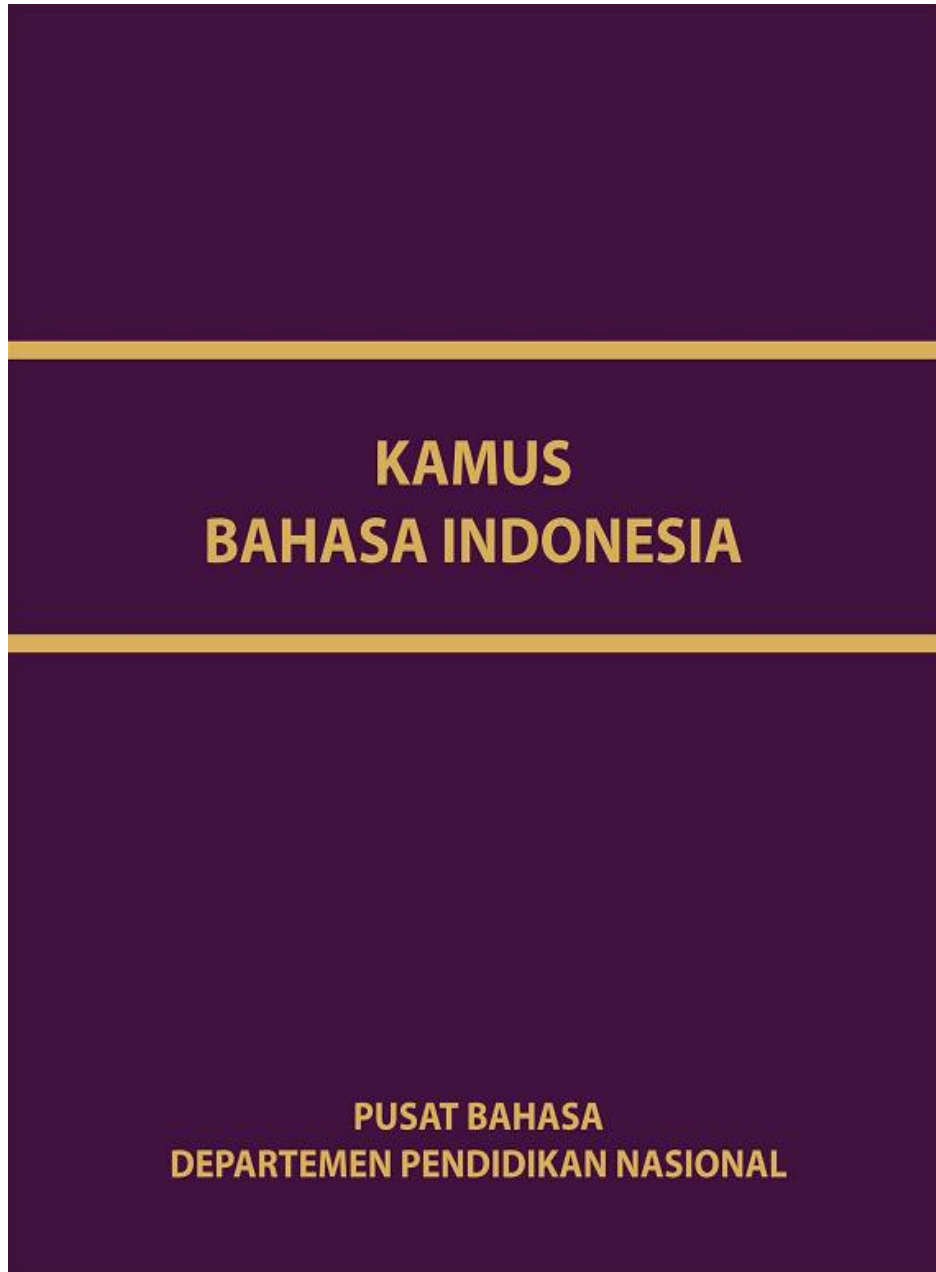
5. Skripsi

Penjelasan mengenai penulisan skripsi yang lebih detil dapat mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi Prodi IHI UKI.

LAMPIRAN



Link PUEBI <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.pdf>



Link KBBI <https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf>

Visi

Menjadi Program Studi yang bermutu,
mandiri dan inovatif dalam bidang Tri
Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia
dan Asia sesuai nilai-nilai kristiani dan
Pancasila pada tahun 2030

Motto

“Melayani, Bukan Dilayani”

*“... sama seperti Anak Manusia datang
bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawaNya
menjadi tebusan bagi banyak orang”.*

(Matius 20:28)

UKI Press

Penerbitan Universitas Kristen Indonesia

Jl. Mayjen Sutoyo No.2, RW.11, Cawang, Kec. Kramat jati,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 13630

ISBN 978-623-6963-44-9



9 786236 963449

